

PENERAPAN KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Karmila Muchtar, M.Si¹⁾

¹ Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Email : karmilamuchtar@yahoo.co.id

Abstrak

Komunikasi partisipatif merupakan inovasi dalam pembangunan dengan pendekatan *bottom up* dan wadah pembelajaran yang menuntut melakukan proses belajar untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama. Komunikasi partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan. Penerapan komunikasi partisipatif dilakukan melalui prinsip dialogis. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang penerapan komunikasi partisipatif dalam berbagai program pembangunan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan analisis deskriptif. Pada umumnya, konsep komunikasi partisipatif merupakan angin segar bagi pembangunan di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan konsepnya sehingga tujuan utama pembangunan belum tercapai dengan baik. Untuk meningkatkan proses komunikasi partisipatif perlu pendekatan yang lebih intensif oleh fasilitator pembangunan dan melibatkan *tutor sebaya* untuk menggerakkan masyarakat secara aktif komunikasi partisipatif perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam berbagai program sehingga peningkatan pembangunan tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan, Indonesia, Partisipasi

Abstract

Participative Communication is an innovation system directed mainly applying bottom-up and participative communication approach of the society. Participative communication provide space for people to exchange information and knowledge . Application of the principle of participative communication is done through dialogue. The study aims to get descriptions on how participative communication can be applied on the various program in Indonesia. The study has been done using survey about variables descriptive analysis. In general, the concept of participative communication is a fresh concepts for development in Indonesia, but the implementation has not been work in accordance with the concept, with the result that the main purpose of development not successful. To increase partisipative communication process, facilitators should carry out more intensive approach and to involve those society who considered as leaders of the society group, i.e to active. Partisipative communication should be maintained through the various program in such that development can be maintained and increased.

Keywords: Communication Development, Indonesia, Partisipative

1. PENDAHULUAN

Komunikasi partisipatif awalnya diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar di Amerika Latin pada tahun 1978. Seorang intelektual Amerika bernama Paulo Freire mencetuskan konsep komunikasi partisipatif bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kata-katanya, baik secara individual atau bersama-sama. Konsep ini kemudian berkembang ke beberapa negara, di Harare, Zimbabwe pada tahun 1994 menemukan bahwa konsep komunikasi partisipatif merupakan pendekatan yang mampu memfasilitasi masyarakat terlibat pada proses yang mampu memberdayakan masyarakat akar rumput sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Sifat komunikatif yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk membangun kepercayaan, pertukaran pengetahuan dan persepsi tentang masalah serta peluang sehingga tercapai konsensus dalam pemecahan masalah dengan semua pemangku kepentingan (Mefalopulos 2003). Di negara lain, seperti yang terjadi di Sub-Sahara Afrika yang menerapkan konsep komunikasi partisipatif pertama kali pada petani. Pendekatan yang dipakai adalah metode partisipatif sehingga petani mengalami pemberdayaan sebagai ahli teknis sendiri dalam mengelola usahanya (Davis 2008).

Sejalan dengan beberapa pelaksanaan komunikasi partisipatif di atas, maka di Afrika Selatan dengan studi kasus kota Kungwini, berdasarkan hasil penelitian Msibi & Penzhorn (2010) ditemukan bahwa komunikasi partisipatif memegang peranan penting dalam pembangunan daerah dengan titik fokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Secara teoritis prinsip komunikasi partisipatif adalah melibatkan masyarakat secara aktif mulai dari mengidentifikasi masalah sendiri, mencari solusi, dan mengambil keputusan untuk penerapan tindakan dalam pembangunan.

Berbeda dengan di Indonesia, prinsip komunikasi partisipatif pada umumnya diterapkan pada pembangunan masyarakat di pedesaan yakni memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pelaksanaan komunikasi partisipatif digunakan sebagai konsep baru dalam berbagai program pemerintah misalnya pada bidang pertanian. Salah satunya adalah program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), program ini merupakan inovasi peningkatan produksi padi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2009. Program ini merupakan salah satu wadah bagi petani sebagai pelaku utama pertanian untuk bertukar informasi dan pengetahuan. Sama halnya dengan program SL-PTT, di Indonesia masih banyak program pemerintah yang mengusung konsep komunikasi partisipatif.

Prinsip pelaksanaan komunikasi partisipatif adalah menggunakan dialog atau komunikasi konvergensi atau lebih dikenal dengan nama dialogis. Tujuannya adalah merangkum solusi dari permasalahan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi partisipatif/konvergensi bersifat dua arah yakni setiap partisipan memiliki hak yang sama untuk bicara ataupun didengar (Tuft 2009). Sifat komunikasi partisipatif merujuk pada konsep komunikasi pembangunan bersifat partisipatif yang tidak hanya sebatas hadir dalam berbagai pertemuan tetapi lebih kepada menempuh cara-cara dialog untuk pengambilan keputusan (Rahim 2004).

Berdasarkan uraian di atas, maka maka Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses komunikasi partisipatif petani dalam berbagai program pemerintah Indonesia. Penelitian ini dirancang dengan metode survei bertujuan menerangkan sejauh mana proses penerapan komunikasi partisipatif dalam berbagai program pembangunan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berbentuk deskriptif untuk

mendeskripsikan proses penerapan komunikasi partisipatif dalam berbagai program.

2. KAJIAN LITERATUR

Komunikasi Partisipatif dalam Paradigma

Pembangunan di Indonesia sejak terlepas dari belenggu penjajahan dipandang sebagai strategi investasi yang identik dengan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan ini mendapat banyak kritikan karena menimbulkan kerusakan alam, kesenjangan sosial, dan ketergantungan. Dalam paradigma pembangunan ini masyarakat dijadikan sebagai obyek pembangunan. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam paradigma ini kerap kali dilakukan secara *top-down*. Program yang dicanangkan sering tidak berhasil karena kurang melibatkan masyarakat dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejak saat itu, komunikasi dikerahkan sebagai saluran informasi dari pemerintah kepada masyarakat untuk menyukseskan tujuan pembangunan. Komunikasi dipandang sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang pembangunan nasional kepada masyarakat agar memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan, dan cara mengadakan perubahan (Nasution 1996). Komunikasi pembangunan adalah proses interaksi seluruh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi mereka. Dalam hal ini, partisipasi tercipta melalui komunikasi dan dengan komunikasi, pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan.

Belajar dari kesalahan pembangunan masa lalu, maka diperlukan sebuah strategi komunikasi dalam pembangunan, diantaranya melalui pendekatan pembangunan *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan dengan ciri

keputusan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dan diskusi (dialog) yang bersifat terbuka dengan menekankan upaya pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan semacam ini dapat juga disebut model komunikasi partisipatif. Habermas (1984, 1989 dalam Melkote 2006) menyatakan bahwa model komunikasi partisipatif telah melengkapi kekurangan dari teori partisipasi dengan menggunakan acuan teori tindakan komunikatif untuk memberikan pendekatan analitis terhadap masalah definisi dan skala kegiatan partisipasi termasuk komunikasi (Jacobson 2003).

Rahim (2004) menyatakan bahwa komunikasi partisipatif dapat diwujudkan dalam bentuk dialog. Esensi dari sebuah dialog adalah pengakuan dan penghormatan terhadap pembicara lain. Setiap pembicara merupakan subjek yang otonom, bukan sebagai obyek komunikasi serta memiliki hak yang sama untuk berbicara dan untuk didengar, mengharapkan suara mereka tidak ditekan atau digabung dengan suara lain. Hal tersebut adalah bentuk ideal komunikasi partisipatif di mana didapatkan benang merah dari kesatuan dan keragaman suara yang menghubungkan kepentingan umum masyarakat.

Dialog merupakan prinsip berlangsungnya proses komunikasi partisipatif di mana setiap peserta memberikan usulan dalam bentuk komunikasi horizontal dengan tujuan untuk mendapatkan strategi komunikasi dalam menghadapi kesenjangan yang ada dan merangkum solusi yang ada. Bahasan dalam dialog tidak hanya bersifat informatif namun lebih luas pada tataran yang mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, serta menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam dialog setiap orang memiliki hak yang sama untuk bicara atau untuk didengar dan berharap bahwa suaranya tidak akan ditekan oleh orang

lain atau disatukan dengan suara orang lain (Tuftte2009).

Makna komunikasi dalam paradigma komunikasi pembangunan partisipatif adalah pergeseran pesan dengan fokus menginformasikan dan membujuk untuk perubahan perilaku kepada penyediaan fasilitas untuk masyarakat dan pemerintah untuk menentukan masalah bersama. Dalam hal ini terjadi perubahan pendekatan *top down*, linear dan searah menuju pendekatan horisontal, interaktif dan dialogis. Komunikasi lebih dimanfaatkan untuk membantu proses belajar melalui pertukaran informasi secara transaksional. Masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan untuk mengurangi terjadinya konflik di dalam kelompok, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hadiyanto (2008) menyatakan pendekatan komunikasi partisipatif akan mengalami kegagalan jika tidak memenuhi prasyarat sebagai berikut :

Perlunya ditumbuhkan keyakinan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam membuat keputusan. Masyarakat bukan sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek yang aktif dalam seluruh proses pembangunan. Selain itu, diperlukan kerelaan dari pihak pemerintah, lembaga masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan untuk berbagi kekuasaan.

Komunikasi pembangunan partisipatif harus menjamin terwujudnya kerjasama timbal balik pada setiap tingkatan partisipan. Artinya, setiap pihak harus berusaha menghargai dan menghormati pendapat dan sikap orang lain, serta memiliki rasa saling percaya. Komunikasi partisipatif lebih berpusat pada penciptaan makna bersama yang menitikberatkan pada tercapainya konsensus atau kesepakatan.

Komunikasi pembangunan partisipatif harus mampu menempatkan semua pihak sebagai partisipan yang setara sehingga tidak ada dominasi dalam arus informasi dari salah satu pihak. Setiap pihak seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sama-sama memposisikan dirinya sebagai aktor komunikasi. Setiap pihak adalah mitra sejajar yang memiliki semangat saling berbagi.

Komunikasi pembangunan partisipatif menghasilkan keputusan secara demokratis melalui proses interaksi dan transaksi secara terus-menerus sehingga konsensus dapat dipertahankan. Komunikasi harus berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, bebas dari tekanan, dan setiap yang terlibat mengambil manfaat sesuai kontribusinya secara adil.

Komunikasi pembangunan partisipatif harus mampu membuka akses dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan semua media komunikasi yang tersedia.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi partisipatif memiliki unsur-unsur berupa kebebasan, kesamaan hak, dan kesamaan akses. Setiap individu berhak mengeluarkan pendapat, didengarkan pendapatnya, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berpendapat tanpa harus ditekan atau disatukan dengan suara orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses, indikator dan hasil yang dicapai dalam penerapan konsep komunikasi partisipatif dalam berbagai program pembangunan oleh pemerintah di Indonesia. Berikut beberapa kajian program-program tersebut :

1. Program Raksa Desa

Program Raksa Desa merupakan program dari pemerintah Jawa Barat untuk pembangunan manusia pada desa-desa miskin dengan pola pada setiap desa diberikan bantuan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan alokasi 60 persen untuk ekonomi modal bergulir, dan 40 persen untuk pembangunan fisik. Desa yang terpilih sebagai penerima bantuan program Raksa Desa adalah desa miskin, desa rawan air bersih, desa rawan infrastruktur jalan, desa rawan listrik, desa rawan sanitasi, desa rawan prasarana pendidikan, serta desa yang belum mendapatkan bantuan program sejenis.

Penelitian tentang program Raksa Desa ini dilakukan pada tahun 2006 di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor (Wahyuni 2006). Indikator komunikasi partisipatif yang digunakan dalam program ini adalah

proses komunikasi diukur dengan indikator arah, intensitas, dan konvergensi komunikasi. Prasyarat partisipasi diukur dengan indikator kesempatan, kemampuan dan kemauan. Partisipasi masyarakat diukur melalui tahapan program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah komunikasi dalam program ini bersifat satu arah, dengan intensitas dan konvergensi komunikasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya intervensi pemerintah. Proses komunikasi demikian menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program rendah, yakni kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat rendah. Masyarakat menilai program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga proses komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah (*top down*). Konvergensi komunikasi yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program Raksa Desa tidak berjalan dengan baik, hal ini menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Banyaknya program-program pemerintah yang bercirikan pembangunan manusia pada kenyataannya hanya program di atas kertas, yang tidak memiliki tujuan jangka panjang sehingga masyarakat hanya dilibatkan sampai batas waktu proyek tersebut kemudian digantikan dengan program lain yang sejenis. Program-program yang bertujuan untuk pembangunan manusia dan ekonomi perlu terus digali dan disempurnakan sehingga memiliki tujuan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

2. Program Prima Tani

Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) merupakan program inovasi teknologi oleh Badan Litbang Pertanian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan lambannya penyampaian informasi dan inovasi dari Badan Litbang Pertanian. Program ini mengajak masyarakat untuk mengenali, merencanakan dan melaksanakan usahatani sehingga mampu mengenali sendiri permasalahannya dan berperan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian tentang Program Prima Tani dilakukan pada tahun 2007 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak (Cahyanto 2007). Komunikasi partisipatif yang dikaji dalam penelitian ini adalah melalui tahap penumbuhan ide, perencanaan program, pelaksanaan program yang dihasilkan, dan penilaian terhadap program yang dihasilkan, sedangkan efektifitas komunikasi dikaji melalui perubahan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (penerapan model usahatani terpadu). Komunikasi partisipatif melalui tahapan penumbuhan ide meliputi kehadiran petani dalam sosialisasi Prima Tani, kesediaan petani mendengarkan dan berusaha memahami penjelasan Prima Tani, kesempatan petani untuk bertanya, petani turut memberikan masukan sesuai permasalahan dan keinginan petani, dan petani dalam mendukung pelaksanaan program.

Penerapan komunikasi partisipatif mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap petani terhadap model usahatani terpadu. Petani mulai dilibatkan dalam program, seperti perencanaan di mana petani dilibatkan dalam kegiatan pendataan, identifikasi wilayah, dan masalah usahatani, kehadiran petani dalam pelaksanaan program model percontohan usahatani dengan keterlibatan petani dalam memberikan usul, saran, dan masukan, penilaian petani terhadap program yang telah berjalan dengan aktif melakukan peninjauan lokasi pelaksanaan model usahatani terpadu, mendampingi penyuluh melakukan pengamatan lahan usahatani, mengamati dan menilai lahan yang dikelola, dan memberikan informasi dan dukungan terhadap model usahatani yang dikembangkan.

Efektivitas komunikasi model usahatani terpadu menunjukkan bahwa melalui komunikasi yang bersifat partisipatif memberikan pengetahuan kepada petani tentang komponen teknologi inovatif model usahatani terpadu. Pengetahuan tersebut meliputi tata air mikrom efisiensi pemupukan, penerapan inovasi usahatani, PHT, Pasca Panen, Pemanfaatan jerami, peternakan, dan perikanan. Pengetahuan tersebut berbanding lurus dengan sikap petani terhadap inovasi model usahatani terpadu, namun dampak akhir yang diharapkan yakni adopsi inovasi belum sepenuhnya diterapkan.

a. Program PNPM Mandiri Pedesaan

Penelitian ini berangkat dari adanya konsep pemberdayaan yang dipandang sebagai jawaban dari pemerintah untuk menyediakan ruang partisipasi yang luas kepada rakyat sebagai subyek pembangunan. Konsep pemberdayaan dianggap mampu menjembatani partisipasi rakyat dan pemerintah dalam proses pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari pada tahun 2009.

Komunikasi partisipatif diukur dengan indikator heteroglasia, dialog dan akses. Hasil penelitian menunjukkan Konsep heteroglasia yang dimaksud adalah keberagaman baik dari variasi ekonomi, sosial, agama dan faktor budaya yang saling melengkapi. Konsep ini belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa partisipan yang tidak dilibatkan dalam musyawarah, seperti Rumah Tangga Miskin (RTM). Dialog dalam program juga belum terwujud karena musyawarah yang terjadi terkesan sebagai bentuk 'pengumuman'. Masyarakat juga belum memiliki akses untuk mempertanyakan bentuk dan tujuan ideal program.

Komunikasi partisipatif yang merupakan jembatan untuk mengakomodir keberagaman belum terlaksana dengan baik, ada beberapa partisipan yang tidak dilibatkan dalam musyawarah program, seperti RTM (Rumah Tangga Miskin). Masyarakat yang mendapatkan undangan musyawarah dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan umumnya didominasi oleh elit desa dan fasilitator. Konsep komunikasi partisipatif dalam penelitian ini adalah konsep heteroglasia, di mana sistem pembangunan seharusnya dilandasi oleh keberagaman baik dari variasi ekonomi, sosial, agama dan faktor budaya yang saling mengisi dan melengkapi.

Komunikasi partisipatif memiliki prinsip yakni pelaksanaan dialog sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Program PNPM MPd belum menunjukkan pelaksanaan dialog sebagai wujud komunikasi partisipatif. Setiap musyawarah yang terjadi memberikan kesan sebagai bentuk "pengumuman" bukan dialog. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mempertanyakan bentuk dan tujuan ideal program karena fasilitator terkesan membuat situasi partisipan harus menerima dan menyepakati misi program yang berasal dari pemerintah sehingga komunikasi cenderung berlangsung satu arah. Hal ini tentu saja memberikan keprihatinan

tersendiri bahwa konsep pemerintah yang berlabel pemberdayaan belum didukung oleh visi dan kebijakan pemerintah dalam implementasinya untuk memberdayakan masyarakat (Muchlis 2009).

b. Bengkulu regional Development Project

Sama halnya dengan berbagai program pembangunan pemberdayaan, di Provinsi Bengkulu juga dilaksanakan program pembangunan yang dikenal dengan nama *Bengkulu Regional Development Project* (BRDP). Program tersebut dalam prinsipnya menggunakan pendekatan partisipatif. Komponen utama program ini adalah pengetasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Program ini dibiayai oleh bank dunia dengan fokus program pada penguatan kapasitas institusi kredit mikro melalui Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD). Keberhasilan program ini tentunya sangat didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai sasaran.

Komunikasi partisipatif dalam penelitian ini dilihat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, komunikasi partisipatif tidak berjalan sesuai dengan harapan karena anggota UPKD bertindak sebagai pendengar, tanpa memberikan sumbangan, pikiran, ide, ataupun saran. Hal ini berdampak pada kurangnya partisipasi warga, karena menganggap bahwa pembangunan fisik yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi warga rendah yakni banyaknya warga yang tidak terlibat dalam pembangunan perbaikan jalan. Hal ini merupakan kelanjutan dari kekecewaan warga dari tahap perencanaan karena memutuskan untuk merenovasi jalan, bukannya pembangunan pasar. Berbeda dengan tahap evaluasi, warga terlibat secara langsung pada tahap evaluasi dengan pertimbangan perlunya informasi

siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan modal bergulir (Mulyasari 2009).

c. Program Pos Pemberdayaan Keluarga

Satu lagi program dengan tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan adalah Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) LPPM IPB bekerjasama dengan Yayasan Damandiri. Posdaya merupakan upaya pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan komunikasi partisipatif diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk turut bersama-sama (P2SDM LPPM IPB, perangkat kelurahan, dan tokoh masyarakat RW 05 Kelurahan Situgede) untuk merencanakan kebutuhan dan keinginan, melaksanakan, dan memberikan penilaian/evaluasi.

Komunikasi partisipatif dikaji melalui konsep akses, heteroglasia, poliponi, dialog, dan karnaval. Setiap kader memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan. Setiap kader terlibat aktif dalam penyampaian pendapat, masukan, serta kritikan. Kader yang memiliki keberagaman (heteroglasia) dari pendidikan, pekerjaan, usia, dan gender tetap menjaga koridor saling menghargai sehingga kegiatan berjalan harmonis, selaras, dan seimbang. Setiap dialog yang dilakukan memberikan hak yang sama dalam bersuara dan tidak ada intervensi (poliponi), tercipta komunikasi dua arah (dialog), sesama kader menciptakan kepercayaan, kesepakatan dalam pengambilan keputusan, membentuk rasa kedekatan dan emosi antar kader, dialog dilakukan dengan santai (diselingi obrolan dan canda), karnaval dilaksanakan di bidang ekonomi (pembuatan dan pengemasan dodol talas), kesehatan (kerja bakti bersih-bersih lingkungan posyandu), dan lingkungan (kerja bakti kebersihan mingguan dan bulanan).

Setiap kader Posdaya memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Komunikasi partisipatif yang berlangsung memiliki dampak pada penyelesaian secara bersama dan saling berbagi informasi dan pengetahuan dalam berbagai bidang kegiatan yang dilakukan Posdaya. Informasi tersebut biasanya didapatkan melalui pertemuan dalam rapat atau forum diskusi dan kegiatan rutinitas sehari-hari di Posdaya Kenanga. Permasalahan yang dihadapi juga diselesaikan melalui musyawarah yang dinilai efektif karena kader berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapat, masukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang pendidikan yang beragam. Musyawarah yang digelar tentu saja berdampak pada terjalannya keakraban antar kader (Satriani 2011).

d. Program Perbaikan Gizi

Pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui upaya perbaikan kesehatan dan gizi masyarakat. Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya akan terwujud pada pribadi yang sehat, untuk itu program *Nutrition Intervention through Community Empowerment* (NICE) hadir sebagai bentuk lain program pemberdayaan. Prinsip program ini adalah akses, keterbukaan, partisipasi, dan kelembagaan. Prinsip tersebut akan terwujud jika ada partisipasi dari masyarakat.

Komunikasi partisipasi dalam penelitian ini mengacu pada bentuk komunikasi monolog-dialog melalui dialog, aspirasi, aksi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program NICE memberikan kesadaran bagaimana mengatur gizi keluarga, membuat jadwal antara keluarga dan kegiatan sosial, menambah pengalaman berteman dengan kelurahan lain. Proses komunikasi tercipta melalui pemaknaan yang sama dengan memberikan pendekatan dan arahan yang jelas dalam sebuah program. Pemaknaan

tersebut terbentuk melalui interaksi secara terus-menerus pada tahap perencanaan berupa pembentukan kelompok, pelaksanaan berupa rapat kerja kelompok dan pelaksanaan rencana kelompok, monitoring dan evaluasi pada saat sosialisasi hasil kerja kelompok.

Dinamika kelompok merupakan proses pelaksanaan kegiatan program yang diukur dari kekompakan, kepemimpinan dan peranan yang dilakukan dalam kelompok program. Hasil program ini belum mampu memberdayakan masyarakat secara langsung karena pemberdayaan membutuhkan waktu yang panjang.

Komunikasi yang monolog dan dialog terjadi dalam peristiwa komunikasi pada tahap pembentukan kelompok, rapat kerja dalam kelompok, sosialisasi hasil kegiatan kelompok. Kegiatan komunikasi yang dialog pada pelaksanaan bersifat fungsional dimana menjalankan fungsi yang telah direncanakan bersama. Sedangkan, komunikasi monolog dan dialog pada tahap pembentukan kelompok bersifat informatif dan interaktif. Tahapan rapat kerja kelompok komunikasi yang digunakan bersifat informatif dan konsultatif. Berbeda dengan tahapan sosialisasi kerja kelompok bersifat interaktif dan konsultatif. Perbedaan ini didasarkan oleh peristiwa yang terjadi dalam interaksi kelompok.

Komunikasi monolog dilakukan melalui tahapan perkenalan dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi bersama, mendengarkan dan mengambil keputusan akan program yang ditawarkan. Substansi komunikasi meliputi informatif, interaktif, konsultatif, dan fungsional (Kusumadinata 2012).

e. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan program pemberdayaan yang bertujuan memahami persoalan perempuan kepala keluarga yang komprehensif yang mengangkat ketidakadilan gender dalam

masyarakat. Prinsip program ini adalah partisipatif, fleksibel, pendampingan dan fasilitasi, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Sama halnya dengan program pemberdayaan lain, program ini akan berhasil mencapai tujuan jika didukung oleh partisipasi masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pada tahap sosialisasi program, bentuk komunikasi cenderung monolog karena didominasi oleh peserta berpendidikan tinggi. Tahapan selanjutnya setelah pendekatan secara personal oleh pendamping, mengikuti pelatihan, menerima materi pengembangan diri maka bentuk komunikasi mulai berubah menjadi monolog-dialog dan dialogis.

Komunikasi partisipatif dalam penelitian ini dikaji melalui adanya akses yang sama bagi perempuan kepala keluarga untuk menghadiri setiap pertemuan, akses terhadap pelatihan-pelatihan, dan akses terhadap program bidang ekonomi seperti simpan pinjam dan dana bantuan langsung masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan awal program PEKKA yakni sosialisasi/penumbuhan ide, bentuk komunikasi umumnya bersifat monolog (artinya tidak ada umpan balik dari peserta). Hal ini memancing pendamping untuk melakukan komunikasi interpersonal sehingga perempuan kepala keluarga lebih berani dan terbuka dalam berpendapat. Pada tahap perencanaan program, semua peserta mendapatkan akses yang sama untuk terlibat dalam perencanaan, bentuk komunikasi bersifat monolog dan dialog. Tahap pelaksanaan program, selalu mengedepankan diskusi dan dialog sehingga setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran dan ikut serta dalam membuat keputusan bersama. Tahap penilaian program, setiap peserta dilibatkan secara langsung dalam memutuskan dan atau menyelesaikan permasalahan bersama.

Faktor yang mempengaruhi komunikasi monolog adalah umur, pendidikan, dan

budaya patriarkhi, sedangkan komunikasi dialogis dipengaruhi oleh faktor individu, peran pendamping dan sosial budaya. Berbeda dengan perempuan kepala keluarga berusia lanjut yang umumnya menggunakan komunikasi monolog karena motif mengikuti program hanya mengisi waktu luang, berkumpul bersama, memperoleh informasi, dan pengetahuan. Norma dan bahasa juga ikut mempengaruhi komunikasi peserta, misalnya norma patriarkhi yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki, sehingga jika kepala desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan PEKKA Provinsi yang berjenis kelamin laki-laki hadir dalam pertemuan, maka mereka mengaku tidak berani bersuara. Norma ini semakin memudar seiring dengan meningkatnya pengetahuan. Bahasa yang digunakan dalam bersosialisasi adalah bahasa daerah sehingga lebih leluasa dalam berbicara dan menyampaikan pendapat.

Tingkat keberdayaan perempuan kepala keluarga dipengaruhi oleh bentuk komunikasi partisipatif mereka dalam program. Perempuan yang aktif atau memiliki bentuk komunikasi cenderung dialogis dalam program memiliki tingkat keberdayaan paling tinggi dibandingkan dengan perempuan kepala keluarga yang kurang aktif maupun perempuan yang hanya sebagai pendengar (Susanty E 2013).

f. Program Pendidikan Lingkungan Hidup *Green School*

Program Pendidikan Lingkungan Hidup *Green School* (PLH) merupakan program yang disepakati oleh perwakilan masyarakat Desa Pasawahan, Desa Cisaat, dan Desa Kutajaya dengan tujuan untuk memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Program ini berupaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Masalah seperti kerusakan lingkungan menurut masyarakat harus segera diatasi untuk menciptakan keharmonisan dan

keseimbangan lingkungan sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara nyata. Program ini memiliki kegiatan berupa pembuatan lubang resapan biopori, pembuatan *waterpond*, pembuatan sumur serapan, pembibitan, dan beternak sapi potong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi partisipatif pada program pendidikan lingkungan hidup untuk mengarahkan perubahan perilaku peserta program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah komunikasi yang dipakai adalah perpaduan antara komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal, saluran komunikasi yang dipakai adalah saluran kelompok dengan media papan tulis, *slide*, catatan dan pamflet yang memudahkan peserta memahami materi yang disampaikan. Komunikasi partisipasi peserta dalam program tinggi yang dicirikan dengan partisipasi peserta yang tinggi dalam program dengan tingkat kehadiran peserta tinggi.

Komunikasi partisipatif berdampak pada perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan praktek kegiatan program PLH, seperti pembibitan pohon, membuat sumur resapan, membuat *waterpond*, beternak sapi, dan membuat lubang biopori (Susanty P 2013).

g. Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTTT)

Program SL-PTT yang merupakan inovasi peningkatan produksi padi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2009. Penelitian tentang program ini dilakukan pada tahun 2014 di Desa Abbokongeng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi selatan (Mughtar 2014). Komunikasi partisipatif dalam penelitian ini diukur melalui indikator pelaksanaan dialog pada tahap PRA (*Participatory Rural Appraisal*), pertemuan, diskusi harian dan temu lapang dengan ciri pemberian kesempatan berdialog, keaktifan petani bertanya/memberi saran, tanggapan

penyuluh dan keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan komunikasi partisipatif pada program SL-PTT di Desa Abbokongeng telah berlangsung walaupun belum optimal di setiap tahapan. Proses penerapan komunikasi partisipatif pada program SL-PTT diukur melalui indikator kesempatan berdialog, keaktifan petani bertanya/memberi saran, tanggapan penyuluh, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Komunikasi partisipatif pada tahap pertemuan dan diskusi harian tergolong tinggi yang ditunjukkan dengan petani aktif dalam menyampaikan pertanyaan, kebutuhan, keluhan dan masalah dalam usahatani, sebaliknya terjadi timbal balik antara petani dan penyuluh pertanian dalam dialog. Berdasarkan pengamatan di lapangan, komunikasi partisipatif dilakukan oleh petani bersama dengan penyuluh menggunakan pola komunikasi dua arah berupa dialog dengan materi komunikasi tentang kebutuhan benih yang menjadi harapan petani. Komunikasi dua arah tersebut ditunjukkan dengan adanya umpan balik setiap partisipan baik secara verbal maupun non verbal.

Pada tahap PRA dan temu lapang, dialog yang terjadi tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan berdialog yang disediakan. Tahapan ini tidak berlangsung dengan baik karena beberapa faktor, diantaranya tahap PRA yang tidak terlaksana dan tahap temu lapang tidak efektif karena petani umumnya tidak meluangkan waktu berkumpul di lapang (sawah) percontohan.

Saluran komunikasi yang digunakan oleh petani dan penyuluh untuk berkomunikasi adalah telepon seluler, pertemuan langsung antara petani dan penyuluh, dan kunjungan penyuluh ke rumah petani. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan saluran komunikasi telepon seluler tidak digunakan oleh semua petani. Media ini hanya digunakan oleh pengurus kelompok

tani, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara kelompok tani.

Secara umum, petani dan penyuluh menggunakan saluran komunikasi tatap muka (*face to face*) yakni proses dialog (diskusi) pada pertemuan langsung di sawah masing-masing dan di rumah petani masing-masing. Proses yang terjadi adalah komunikasi dua arah. Komunikasi ini memiliki fungsi dalam penyampaian arus informasi terkait materi dan teknologi dalam SL-PTT, petani memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menyampaikan kendala, masalah, dan kebutuhan mereka.

Komunikasi partisipatif yang berlangsung di Desa Abbokongeng membuat petani tidak ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi dalam SL-PTT. Alasan petani melakukan hal tersebut adalah: (1) Tingkat kepercayaan petani terhadap penyuluh lapangan yang bertugas di Desa Abbokongeng tinggi. Kerjasama petani dengan penyuluh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian sangat erat. Salah satu petani yang berstatus PNS menyatakan "*sebagai petani dan PNS saya percaya dengan penyuluh pertanian karena benar-benar mengabdikan untuk petani di Desa Abbokongeng, kata Pak M (57 tahun)*", (2) Petani dan penyuluh lapangan yang bertugas menjalin hubungan akrab selayaknya keluarga sendiri. Hal ini salah satunya disebabkan kepribadian penyuluh yang ramah dan kemampuan berkomunikasi yang mampu menciptakan suasana santai, terbuka, dan nyaman untuk berdialog.

h. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan pada program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dilakukan di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang pada tahun 2014 (Muslikhah 2014). Komunikasi partisipatif dalam penelitian ini diukur melalui indikator pelaksanaan dialog, penyampaian aspirasi dan refleksi-aksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog atau diskusi antara anggota kelompok wanita tani (KWT) dilakukan secara optimal baik antara anggota maupun dengan penyuluh/fasilitator. Dampak dialog tersebut adalah wawasan anggota bertambah sehingga mampu berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Anggota KWT baik yang berusia muda atau tua mampu menyuarakan aspirasinya sehingga masing-masing anggota memiliki kepercayaan diri. Bentuk refleksi dari aksi sebagai ciri keberlanjutan program melalui pembuatan kebun bibit, jadwal piket rutin pengelola kebun dan pengadaan kebun sekolah. Upaya pemberian kesempatan untuk berdialog, pemberian hak mengungkapkan pendapat (*voice*), aksi refleksi dalam tindakan kolektif telah membangun rasa percaya diri, *self efficacy*, pemikiran kritis dan budaya untuk bermusyawarah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah komunikasi partisipatif merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi yang berusaha membangkitkan gairah masyarakat ini dirangkul melalui komunikasi *akar rumput* dibumbuhi oleh kebijakan dan intervensi pemerintah. Komunikasi ini berusaha mendekati masyarakat untuk memikirkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga melahirkan persetujuan pemerintah dalam bentuk program. Kalimat yang mungkin tepat untuk menggambarkan wujud pelaksanaan komunikasi partisipatif adalah "kegiatan masyarakat yang didukung oleh pemerintah", bukan sebaliknya, "program pemerintah yang dilaksanakan oleh masyarakat".

Komunikasi partisipatif yang berhasil dilakukan menjadi angin segar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam beberapa studi dan penelitian, komunikasi partisipatif

tidak berjalan sesuai harapan. Prinsip pembangunan yang bersifat “top down” masih kental terasa sehingga banyak program yang tidak benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan tingkat partisipasi rendah. Berbagai program pemerintah berhasil dalam aspek teknis, namun jarang berhasil dalam memberdayakan masyarakat. Pembangunan yang demikian akan menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

5. REFERENSI

- Cahyanto, P. 2007. Efektivitas Komunikasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Prima Tani di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Davis K E. Extension in Sub-Sahara Africa: Overview and Assessment of Post and Current Model, and Future Prospects. *Journal of International Agricultural and Extension Education*. Volume 15: Nomor 3, Fall 2008. Association of International Agricultural and Extension Education. 2008.
- Hadiyanto. 2008. Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pendekatan Awal. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Volume 06: Nomor 2. 2008.
- Jacobson, T.L. *Participatory Communication for Social Change: The Relevance of the Theory of Communicative Action*. In P.J. Kalbfleisch (ed.), *Communication Yearbook* (Vol.27). Mahwah, NJ: Lawrence, Erlbaum Associates/Publishers. 2003.
- Kusumadinata, A.A. 2012. Analisis Komunikasi Partisipatif pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Perbaikan Gizi (Studi Kasus Kelompok Gizi Masyarakat Pulokerto Kota Palembang). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Mefalopulos, P. *Theory and Practice of Participatory Communication (The case of the FAO Project “Communication for Development in Southern Africa”)* [disertation]. Texas at Austin. The University of Texas at Austin. 2003.
- Melkote, S.R Everett M. Rogers and His Contributions to the Field of Communication and Social Change in Developing Countries. *Journal of Creative Communications* 1:1. New Delhi: Sage Publications. 2006.
- Muchlis, F. 2009. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Implementasi Musyawarah dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Muchtar, K. 2014. Komunikasi Partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Desa Abbokongeng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Mulyasari, G. 2009. Komunikasi Partisipatif Warga pada Bengkulu Regional Development Project (Kasus di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Muslikhah, F. 2014. Komunikasi Partisipatif pada Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan pada program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Msibi, F & Penzhorn, C. Participatory Communication for Local Government in South Africa : A Study of the Kungwini Local Municipality. *Article Information Development*26(3).South Africa: Sage Publications, 2010. Kabupaten Bogor.[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nasution, Z. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, edisi revisi. Jakart (ID): Rajagrafindo Persada. 1996.
- Rahim, SA. *Participatory Development Communication as a Dialogical Process*. In White SA, Nair KS. *Participatory Communication: Working for Change and Development*. New Delhi: Sage Publications, 2004.
- Satriani, I. 2011. Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Susanty, E. 2013. Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Kasus di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh).[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Susanty, P. 2013. Komunikasi Partisipatif pada Pelaksanaan Program Pendidikan Lingkungan Hidup Green School di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tufte T., Mefalopulos. *Participatory Communication*. Washington D.C: The World Bank, 2009.
- Wahyuni, S. 2006. Proses Komunikasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea